

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Tita Fusvita (2020) dalam Penelitian yang berjudul ” **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan**”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat bergantung kepada peranan pemerintah dan masyarakatnya. Permasalahan pada Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan masih kurang keikutsertaan masyarakat dalam proses sosialisasi dan kurang memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan tebing Tinggi Kabupaten Balangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan secara purposive sampling berjumlah 11 orang. Setelah data terkumpul kemudian di analisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data pada penelitian ini perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi,

analisis kasus negatif, dan mengadakan membercheck. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Balangan belum baik, hal ini dapat dilihat dari indikator : Pertama, pada aspek Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan di ketahui pada indikator musyawarah banyak membuang waktu. Pada indikator penyampaian pendapat aspirasi tidak memberikan sumbangan pemikiran. Kedua, pada aspek Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan di ketahui pada indikator memberikan sumbangan berbentuk uang murni dari dana Desa. Pada indikator memberikan sumbangan dalam bentuk barang peralatan masyarakat memberikan bahan atau barang Pada indikator memberikan sumbangan dalam bentuk tenaga masyarakat antusias berpartisipasi. Ketiga, pada aspek Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi di ketahui pada indikator mengawasi pembangunan adanya kegiatan yang tidak terlaksana. Pada indikator memberikan kritikan kurangnya keikutsertaan masyarakat Pada indikator memberikan saran kurangnya partisipasi masyarakat. Keempat, pada aspek Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan di ketahui pada indikator pemanfaatan hasil pembangunan belum meningkatnya kualitas perencanaan. Pada indikator memelihara hasil pembangunan dalam pelaksanaan program masyarakat menumbuhkan rasa saling peduli. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi dua faktor penghambat adalah kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sumbangan pemikiran, kurangnya pendidikan masyarakat, kurangnya motivasi, kurangnya pengawasan, pelaksanaan pembangunan yang belum baik, kurangnya pemanfaatan hasil

pembangunan dan kurangnya pemeliharaan hasil pembangunan di desa. Sedangkan faktor pendukung adalah adanya sumbangan barang dari masyarakat dan adanya sebagian sumbangan tenaga oleh masyarakat. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Simpang Bumbuan Kecamatan Tebing tinggi Kabupaten Balangan disarankan kepada Kepala Desa agar memberikan pendekatan personal, Aparat desa hendaknya dapat berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengajak masyarakat, Warga masyarakat dapat bekerjasama dengan pemerintah desa.

2. Muhtardin (2021) dalam penelitian yang berjudul “**Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tahun 2020 di Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dimana cara yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah yaitu dengan cara mengumpulkan, menyusun, menjelaskan, menganalisis serta mengumpulkan data dari objek yang sedang diteliti, dalam hal ini teknik yang digunakan yaitu dengan cara wawancara yang

dilakukan kepada pihak yang dianggap penting. Jadi data penelitian ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Tembalae, Sekretaris Desa, Ketua BPD, 2 Staf Desa dan 4 tokoh masyarakat serta 5 tokoh pemuda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan Desa Tembalae tahun 2020 sudah ada namun belum maksimal di sebabkan karena pemerintah Desa Tembalae belum sepenuhnya melibatkan semua elemen masyarakat dengan adanya hambatan dari kurangnya kesadaran, tingkat pendidikan masyarakat, kesibukan dan dampak pandemi Covid-19 serta masih kurangnya komunikasi dari pemerintah Desa Tembalae kepada masyarakat. Adapun hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu Tahun 2020, pemerintah Desa Tembalae harus mensosialisasikan terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai jadwal dan tujuan diadakannya musyawarah perencanaan pembangunan (musrembangdes), pemerintah Desa Tembalae harus menyesuaikan dalam hal penetapan hari pelaksanaan musrembangdes tidak bertepatan dengan kesibukan masyarakat dengan aktivitas pekerjaan supaya masyarakat yang hadir lebih banyak saat musrembangdes serta masyarakat Desa Tembalae juga harus menyadari akan pentingnya menjalin komunikasi, berpartisipasi dan bekerja sama dalam perencanaan serta penetapan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa Tembalae Kecamatan Pajo Kabupaten Dompu.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan desa, yang menjadi fokus penelitian Tita Fusvita (2020),

Muhtardin (2021), dan penelitian skripsi ini. Persamaan ketiga penelitian terletak pada pengakuan bahwa keterlibatan masyarakat sangat menentukan efektivitas pembangunan, baik dalam proses musyawarah, pelaksanaan, maupun pemanfaatan hasil pembangunan. Ketiga penelitian sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis partisipasi masyarakat, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Namun, terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiganya, terutama terkait tahap partisipasi yang diteliti. Penelitian Tita Fusvita (2020) menekankan partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan, di mana warga terlibat melalui kontribusi uang, tenaga, dan barang, namun masih terbatas dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi. Penelitian Muhtardin (2021) fokus pada keikutsertaan masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), dengan hambatan utama berupa kurangnya kesadaran warga, tingkat pendidikan, kesibukan, dampak pandemi Covid-19, dan komunikasi pemerintah desa yang terbatas. Berbeda dengan kedua penelitian terdahulu, penelitian skripsi ini menekankan partisipasi masyarakat sejak tahap perencanaan pembangunan desa, yaitu bagaimana warga dilibatkan dalam Musrenbangdes sejak awal penyusunan rencana pembangunan, serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Dari perbedaan tersebut muncul kebaruan (novelty) penelitian skripsi. Dengan menempatkan fokus pada tahap perencanaan, penelitian ini menganalisis partisipasi secara lebih strategis dan komprehensif, tidak

hanya pada pelaksanaan atau musyawarah saja. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi peran masyarakat dari awal hingga akhir siklus pembangunan, sehingga hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang lebih efektif bagi pemerintah desa dalam mendorong keterlibatan warga secara transparan dan inklusif.

Dengan demikian, penelitian skripsi ini menempati posisi yang lebih strategis dibanding penelitian terdahulu. Fokus pada tahap perencanaan dan penggunaan teori yang komprehensif memberikan kontribusi baru bagi pengembangan model pembangunan partisipatif di tingkat desa, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam merancang proses perencanaan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat secara maksimal.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (dalam Mustanir 2022:19) pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.

Menurut Sabir dkk, (dalam Mustanir 2022:19) Pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap instansi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga

Independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik . Kegiatan itu dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan semua yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan Tindakan atau serangkaian Tindakan pelayanan publik

Pengertian pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan **administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.** Pelayanan publik tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas kehidupan warga negara. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dilaksanakan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Definisi pelayanan publik Menurut para ahli (dalam Mustanir 2022:19) sebagai berikut :

- 1) Menurut Dwiyanto Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh birokrasi publik guna memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan peralatan publik.
- 2) Menurut Sinambela, pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah

ditetapkan.

- 3) Menurut Mahmudi, pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Menurut Siriattakul dkk, (dalam Mustanir 2022:21) Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public yaitu setiap institusi penyelenggaraan Negara, korporasi, Lembaga independent yang telah dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk hanya semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja didalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

2. Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Menurut Kamus bahasa Indonesia (1996:56), definisi partisipasi adalah: "Hal yang berkenaan dengan turut serta dalam suatu kegiatan atau berperan serta dalam suatu kegiatan. Jadi, dapat diartikan bahwa partisipasi adalah suatu bentuk kerjasama

yang diberikan apabila suatu pihak sedang melakukan suatu kegiatan". Dengan keterlibatan dirinya, berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya. Misalnya berpartisipasi/ikut serta (dapat anda rasakan sendiri), maka anda melakukan kegiatan itu karena menurut pikiran anda perlu dan bahwa perasaan pun menyetujui untuk melakukannya. Partisipasi tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan adanya kesadaran dan kemauan dari individu untuk terlibat secara aktif.

Menurut Isbandi dkk, (dalam Mustanir dkk, 2022 : 32) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Adapun pengertian partisipasi berdasarkan para ahli:

Menurut Prasadja (dalam Agustina, 2022 : 34) Partisipasi sebagai bentuk kontribusi terorganisasi yang dilakukan masyarakat untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan umum pemerintah. Posisi pemerintah dan masyarakat adalah setara dan saling membutuhkan satu sama lain atau sering dikenal dengan hubungan kemitraan.

Menurut Theresia dkk (dalam Rizal, 2022: 56) mengartikan Partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan

pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

b. Bentuk Partisipasi

Bentuk-bentuk partisipasi merupakan unsur-unsur dalam mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan, Menurut Cohen dan Uphoff (dalam Irene, 2015:61) yaitu :

1) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi jenis ini sangat penting karena masyarakat menurut ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Adapun wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini bisa bermacam-macam seperti: hadir rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur partisipasi masyarakat adalah partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ini lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam bentuk materi umumnya bersifat pada wujud dan terlihat jelas seperti partisipasi dalam bentuk uang, sumbangan tenaga dan barang untuk pelaksanaan suatu pembangunan.

3) Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Partisipasi jenis ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kuantitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output. Sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar presentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Partisipasi masyarakat desa dalam pemanfaatan hasil pembangunan desa juga dilihat dari keikutsertaan masyarakat di dalam memanfaatkan, memelihara, dan melestarikan hasil-hasil pembangunan desa yang ada.

4) Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi jenis ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Adapun menurut Dusseldorp (dalam Kumiyati 2019:55) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

- a) Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b) Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c) Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain;
- d) Menggerakkan sumberdaya masyarakat;

- e) Mengambil bagian dari dalam proses pengambilan keputusan:
- f) Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakat.

c. Tingkat Partisipasi

Tingkat partisipasi masyarakat adalah derajat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi kegiatan. Tingkat partisipasi menunjukkan seberapa besar masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berkontribusi dalam pengambilan keputusan, serta berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan. Tingkatan partisipasi masyarakat sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan perlu diketahui oleh agen pembangunan. Oleh karena itu, indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Sementara Wilcox (dalam Theresia 2014:202) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu:

1. Memberikan informasi (*information*)
2. Konsultasi (*consultation*), yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan.

4. Bertindak bersama (*acting together*), dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.
5. Memberikan dukungan (*supporting independent community interest*); dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasihat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Dari kelima tingkatan partisipasi di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran dalam kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga pemberian dukungan terhadap program pembangunan. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, maka semakin besar pula rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas masyarakat serta kemitraan antara pemerintah dan warga menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Menurut Slamet, (2014:97) untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologi

seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan.

2. Faktor Eksternal

Menurut Sunarti dalam jurnal tata lokal, (2013:9), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Stakeholder kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh signifikan, atau mempunyai posisi penting guna kesuksesan program.

d. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Partisipasi**

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi adalah unsur-unsur atau kondisi tertentu yang dapat memperkuat atau melemahkan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan. Faktor-faktor ini menentukan sejauh mana masyarakat mau dan mampu ikut serta secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan. Menurut Slamet (dalam Theresia 2014:207) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi.
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, keberhasilan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada sejauh mana kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat difasilitasi serta dikembangkan dalam proses pembangunan. Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam menciptakan partisipasi yang efektif dan berkelanjutan.

e. Faktor Penghambat Partisipasi

Faktor penghambat partisipasi adalah segala bentuk kondisi, keadaan, atau situasi yang menyebabkan masyarakat tidak dapat atau enggan terlibat secara aktif dalam proses pembangunan. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam diri masyarakat sendiri maupun dari lingkungan luar yang memengaruhi perilaku partisipatif. Menurut Soetrisno (dalam Theresia 2014:211) mengidentifikasikan beberapa masalah berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yakni:

- 1) Masalah pertama dan terutama dalam pengembangan partisipasi masyarakat adalah belum dipahaminya makna sebenarnya tentang partisipasi oleh pihak perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - a) Pada tataran perencanaan pembangunan, partisipasi didefinisikan sebagai kemauan masyarakat untuk secara penuh mendukung pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan sendiri oleh (aparatur) pemerintah, sehingga masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai sub-ordinasi pemerintah.

- b) Pada pelaksanaan pembangunan di lapangan, pembangunan yang dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai kebutuhan masyarakat, sedangkan yang dirancang dan ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat yang memperoleh prioritas lebih rendah.
 - c) Partisipasi masyarakat, sering didefinisikan sebagai kerjasama pemerintah dan masyarakat yang tidak pernah memperhatikan adanya sub-sistem yang disubordinasikan oleh supra-sistem, dan aspirasi masyarakat cukup diakomodasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Masalah kedua adalah dengan dikembangkannya pembangunan sebagai ideologi baru yang harus diamankan dengan dijaga ketat, yang mendorong aparat pemerintah bersifat otoriter.
 - 3) Masalah ketiga adalah banyaknya peraturan yang meredam keinginan masyarakat untuk berpartisipasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor penghambat partisipasi masyarakat merupakan cerminan dari masih rendahnya pemahaman dan penerapan prinsip pembangunan partisipatif. Kondisi tersebut menegaskan perlunya upaya perbaikan dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek aktif dalam proses pembangunan. Melalui peningkatan kesadaran, komunikasi yang terbuka, serta penguatan kapasitas masyarakat dan aparat desa,

diharapkan partisipasi masyarakat dapat berkembang secara lebih bermakna dan berkelanjutan.

3. Masyarakat

a. Pengertian Masyarakat

Istilah “masyarakat” berasal dari bahasa Arab, yakni berasal dari kata syaraka yang berarti “ikut serta, berpartisipasi.” Sementara di bahasa Inggris, istilah “masyarakat” disebut dengan *society* yang berasal dari kata latin *socius* berarti “kawan.” Menurut penelitian dari UIN Suska (2020).

Selo Soemardjan (1962) mengemukakan bahwa “Masyarakat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan tertentu.”

Koentjaraningrat, ahli antropologi Indonesia, (dalam buku Pengantar Ilmu Antropologi Cetakan Kesembilan, 2002:150) , menyebutkan definisi masyarakat adalah “sekelompok manusia yang saling bergaul atau dengan istilah lain saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai persamaan melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi.”

Menurut Paul B. Harton. (dalam latif, dkk 2023:116) Menyatakan bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Menurut Abdul Syani (dalam latif, dkk 2023:116) menyatakan bahwa pengertian masyarakat adalah berkumpul, bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

b. Bentuk-Bentuk Masyarakat

Menurut Seom ardjan (dalam Seokanto 2013:49), masyarakat di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori yakni masyarakat sederhana, masyarakat madya dan masyarakat pra-modern atau masyarakat modern. Adapun ciri-ciri utama dari masyarakat-masyarakat tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Masyarakat Sederhana

- a) Hubungan dalam keluarga dan dalam masyarakat setempat sangat kuat.
- b) Organisasi sosial pada pokoknya didasarkan atas adat istiadat yang terbentuk menurut tradisi.
- c) Kepercayaan kuat kepada kekuatan-kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia, akan tetapi tidak dapat dikuasi olehnya, tidak ada lembaga-lembaga khusus untuk memberi pendidikan dalam bidang teknologi, keterampilan diwariskan oleh orang tua kepada anak sambil berpraktek dengan sedikit teori dan pengalaman dan tidak dari hasil pemikiran atau eksperimen .
- d) Tingkat buta huruf relatif tinggi.
- e) Hukum yang berlaku tidak tertulis, tidak kompleks dan pokok-pokoknya diketahui dan ditahan oleh hampir semua warga masyarakat yang sudah dewasa.

- f) Ekonominya sebagian besar meliputi produksi untuk keperluan keluarga sendiri atau untuk para pasaran kecil setempat, sedangkan uang sebagai alat penukaran dan alat pengukur harga berperan secara terbatas sekali.
- g) Kegiatan ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama orang banyak dilakukan secara tradisional dengan gotong royong tanpa hubungan kerja antar buruh dengan majikan.

2) Masyarakat Madya

- a) Hubungan keluarga tetap kuat, akan tetapi hubungan dengan masyarakat setempat sudah mulai mengendor dan menunjukkan gejala-gejala hubungan atas dasar perhitungan ekonomi.
- b) Adat-istiadat masih dihormati, akan tetapi sikap masyarakat mulai terbuka bagi pengaruh dari luar.
- c) Dengan timbulnya rasionalitas dalam cara berfikir maka kepercayaan pada kekuatan-kekuatan gaib baru timbul apabila orang sudah kehabisan akal untuk menanggulangi suatu masalah.
- d) Di dalam masyarakat timbul lembaga-lembaga pendidikan formal sampai tingkat sekolah lanjutan pertama, akan tetapi masih jarang sekali adanya lembaga pendidikan keterampilan atau kejuruan.
- e) Tingkat buta huruf relatif turun.
- f) Hukum tertulis mulai mendampingi hukum tidak tertulis.
- g) Ekonomi masyarakat memberi kesempatan lebih banyak kepada produksi buat pasaran, dan mulai menimbulkan diferensiasi dalam struktur masyarakat, dan uang semakin meningkat peranannya.

- h) Gotong royong tradisional tinggal untuk keperluan sosial kalangan keluarga besar dan tetangga, akan tetapi golong royong untuk keperluan umum dilakukan atas dasar upah.

3) Masyarakat Pra Modern Modern

- a) Hubungan antar manusia terutama didasarkan atas kepentingan-kepentingan pribadi.
- b) Hubungan dengan masyarakat-masyarakat lain di lakukan secara terbuka dalam suasana saling pengaruh-mempengaruhi, kecuali (mungkin) dalam penjagaan rahasia penemuan-penemuan baru.
- c) Kepercayaan kuat pada manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d) Masyarakat digolongkan menurut bermacam-macam profesi serta keahlian yang masing-masing dapat dipelajari dan ditingkatkan dalam lembaga-lembaga pendidikan keterampilan dan kejuruan.
- e) Tingkat pendidikan formal adalah tinggi dan merata.
- f) Hukum yang berlaku pada pokoknya hukum tertulis yang sangat kompleks.
- g) Ekonomi hampir seluruhnya merupakan pasaran yang didasarkan atas penggunaan uang dan alat-alat pembayaran lain. Demikian pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan interaksi yang dilakukan oleh sekelompok manusia yang telah bermukim dan bekerja sama dalam suatu wilayah (tempat) tertentu.

Serta terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan dalam berperilaku.

4. Perencanaan

a. Pengertian Perencanaan

Perencanaan (*planning*) dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu (dalam Baskoro, dkk 2021:18).

Perencanaan menurut para ahli (dalam Baskoro, dkk 2021:18-19) sebagai berikut:

1. Menurut Ery Sunary, Perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi, taktik, kebijakan, tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh.
2. Menurut Barbara Becker, Perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan.
3. Menurut Jacqueline Alder, Pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
4. Menurut John Douglas, definisi perencanaan adalah suatu proses kontinyu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya.
5. Menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, perasaan strategi, kebijakan, dan

rencana terperinci untuk mencapainya, merupakan organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kerja dan umpan balik terhadap pengalaman siklus perencanaan baru.

b. Asas-Asas Perencanaan

1. *Principle of contribution to objective* (asas tujuan) Setiap perencanaan dan segala perubahan harus ditunjukkan kepada pencapaian tujuan.
2. *Principle of efficiency of planning* (asas perencanaan efisiensi) Jika perencanaan itu untuk pelaksanaannya memerlukan suatu biaya, tenaga, dan waktu yang sekecil-kecilnya, tetapi membawa hasil yang lebih besar, maka perencanaan itu dapat dikatakan efisien.
3. *Principle of primacy of planning* (asas pengutamaan perencanaan) Perencanaan merupakan fungsi dari manajemen yang harus lebih dahulu dikerjakan, karena perencanaan dapat mempermudah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya seperti fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, fungsi penyusunan, fungsi pengawasan, fungsi pengendalian, dan fungsi perumusan kebijaksanaan.
4. *Principle of pervasiveness of planning* (asas pemerataan perencanaan) Asas pemerataan perencanaan memegang peranan penting mengingat pemimpin pada tingkat tinggi banyak mengerjakan perencanaan dan bertanggung jawab atas berhasilnya rencana itu.

5. *Principle of planning premise* (asas pokok perencanaan) Pokok–pokok perencanaan sangat berguna bagi rencana, sebab premis–premis perencanaan dapat menentukan kegiatan yang akan datang.
6. *Principle of policy frame work* (asas kebijaksanaan pokok kerja kebijaksanaan) Menunjukkan pada garis–garis besar, prosedur–prosedur kerja dan program–program kerja tersusun.
7. *Principle of timing* (asas waktu) Adalah penentuan waktu yang tepat, singkat dan jelas.
8. *Principle of planning communication* (asas tata hubungan perencanaan) Perencanaan dapat disusun serta dilaksanakan dengan baik, jika setiap orang bertanggung jawab terhadap aktivitasnya dan memperoleh penjelasan yang memadai mengenai bidang yang akan dikerjakannya.

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip perencanaan seperti *principle of contribution to objective, efficiency of planning, primacy of planning, pervasiveness of planning, planning premise, policy framework, timing, dan planning communication* merupakan landasan fundamental dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif dan terarah. Implementasi prinsip-prinsip tersebut secara konsisten tidak hanya menjamin efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, tetapi juga memastikan keselarasan antara tujuan, kebijakan, penentuan waktu, serta koordinasi antar pelaksana, sehingga mampu menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Selain itu, penerapan prinsip perencanaan yang komprehensif mendorong keterpaduan antara perencanaan di tingkat kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini penting untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam proses pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas hasil pembangunan secara keseluruhan..

5. Pembangunan

Pembangunan menurut para ahli (dalam afni, dkk 2024 :1-3) sebagai berikut :

- a. Menurut W.W. Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam suatu garis lurus, yakni dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Pembangunan pada mulanya ditujukan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui usaha-usaha industrialisasi dan modernisasi. Dalam perkembangannya, definisi tersebut kemudian meluas mencakup pula perbaikan-perbaikan dalam bidang sosial, politik, dan kebudayaan sehingga menjadi pembangunan sebagai suatu proses multidimensional.
- b. Menurut Pontoh dan Kustiwan mendefinisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.
- c. Menurut Kartz mengartikan pembangunan sebagai perubahan yang lebih luas dari masyarakat terhadap suatu keadaan kehidupan yang kurang bernilai kepada keadaan yang lebih bernilai.
- d. Menurut Subandi, Pembangunan diartikan sebagai bentuk perubahan yang sifatnya direncanakan. Setiap orang atau kelompok orang tentu akan mengharapkan perubahan yang mempunyai bentuk lebih baik, bahkan sempurna, dari keadaan yang sebelumnya. Untuk mewujudkan harapan ini, tentu harus mendatangkan suatu perencanaan.

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Penamaan kerangka pemikiran bervariasi, kadang disebut juga kerangka konsep, kerangka teoritis atau model teoritis (*theoretical model*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa bersama masyarakat memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagai pedoman pembangunan desa. Proses perencanaan pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara partisipatif melalui musyawarah desa (Musdes) agar pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, prioritas, serta potensi yang dimiliki desa.

Realitas yang terjadi di Desa Guha, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa belum berjalan secara optimal. Keterlibatan masyarakat cenderung bersifat formalitas, yang terbatas pada kehadiran fisik dalam forum musyawarah tanpa diikuti kontribusi yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Proses musyawarah perencanaan pembangunan sering kali didominasi oleh aparat desa dan tokoh tertentu, sehingga aspirasi masyarakat

secara luas belum sepenuhnya terakomodasi. Selain itu, rendahnya tingkat sosialisasi, terbatasnya akses informasi, serta kurangnya kesadaran dan inisiatif masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun berperan dalam evaluasi pembangunan turut berkontribusi pada hasil pembangunan yang belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan dan prioritas warga.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip ideal partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dan praktik di lapangan. Berdasarkan konsep partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Hutagalung, 2022:12), kondisi di Desa Guha mencerminkan rendahnya partisipasi masyarakat pada keempat dimensi partisipasi, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes, dominasi aparat desa dalam pelaksanaan pembangunan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi dan pemeliharaan hasil pembangunan..

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan desa melalui penguatan kapasitas warga, peningkatan komunikasi dan kepemimpinan pemerintah desa, serta perbaikan mekanisme musyawarah yang lebih terbuka dan inklusif. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa Guha, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan diharapkan meningkat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

